



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**MAKASSAR**

*Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 kode pos 90243*  
*Email : [bdkmsr@gmail.com](mailto:bdkmsr@gmail.com) Tlp. 554875, Fax. 554535*

---

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020**



**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
MAKASSAR**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**MAKASSAR**

*Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Kotak Pos 1397 Tlp. 554875, Fax. 554535*

---

**K E P U T U S A N**

**KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**  
**Nomor : SK.62/BDLHK-6/SPKD/REN.0/10/2020**

**Tentang**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN MAKASSAR NOMOR SK. 49/BDLHK-6/REN.0/7/2019  
TENTANG RENCANA KERJA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN MAKASSAR TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian anggaran dan target kinerja lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S.302/MK.02/2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
  11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang RKP Tahun 2020;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

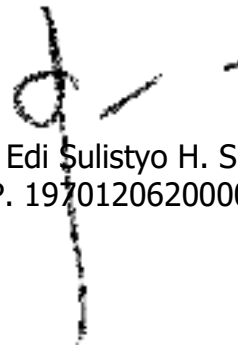
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.49/BDLHK-6/SPKD-6/REN.0/7/2019 RENCANA KERJA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR TAHUN 2020.

Kesatu : Target dan Alokasi Anggaran pada Keputusan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Nomor SK.49/BDLHK-6/SPKD-6/REN.0/7/2019 tentang Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 diubah dikarenakan adanya penghematan menghadapi keadaan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Kedua : Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai acuan dalam:
1. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020.
  2. Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 26 Oktober 2020  
Kepalai Balai,



Dr. Edi Sulisty H. Susetyo, S.Hut, M.Si  
NIP. 197012062000031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku selaku Korwil.

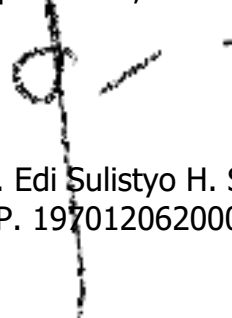
## KATA PENGANTAR

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Diklat LHK) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan diklat aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dituntut dapat berkinerja terukur untuk menunjang Reformasi Birokrasi pada BP2SDM.

Rencana Kerja Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 disusun sebelum adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian anggaran dan target kinerja lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S.302/MK.02/2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2020. Oleh karena itu rencana Balai Diklat LHK Makassar berubah merujuk pada Pagu Refocusing yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM nomor : S.11/P2SDM/SET/KEU.1/4/2020 pada tanggal 21 April 2020.

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, dokumen Perubahan Renja ini telah disusun sebagai pedoman kerja di lingkup Balai Diklat LHK Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka membangun kinerja yang akuntabel, efektif dan efisien.

Kepala Balai,



Dr. Edi Sulistyo H. Susetyo, S.Hut, M.Si  
NIP. 197012062000031004



## DAFTAR ISI

SK. Kepala BDLHK Makassar	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Kata Pengantar .....	v
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	4
II. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020 .....	7
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2019 dan Prognosis TA. 2020 .	7
B. Capaian Serapan Anggaran TA. 2019 dan Prognosis TA. 2020 .....	11
III. Rencana Kerja Tahun 2020 .....	14
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	14
B. Kegiatan, sasaran kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020 .....	17
IV. Penutup .....	22
Lampiran	
1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2020	
2. Rencana Diklat Tahun 2020	
3. Rencana Kinerja Tahun 2020	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Makassar .....	5
Gambar 2. Jumlah Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Jabatan .....	5
Gambar 3. Jumlah Pegawai Lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Pendidikan .....	6
Gambar 4. Jumlah ASN Lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Golongan .....	6

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar TA 2019 .....	7
Tabel 3. Penyelenggaraan Diklat TA 2019 .....	8
Tabel 4. Rencana dan Realisasi Diklat Pendampingan KTH .....	9
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar s/d Agustus 2020.....	10
Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Balai Diklat LHK Makassar TA 2019 ....	11
Tabel 7. Capaian serapan anggaran satker Balai Diklat LHK Makassar s/d Agustus 2020.....	12
Tabel 8. Jenis Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2020 .....	16
Tabel 9. Jenis Pelatihan Masyarakat Tahun 2020 .....	20



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Memasuki periode pembangunan nasional tahun 2020 – 2024, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan tiga pilar pembangunan nasional. Pengelolaan SDA Indonesia menjadi basis dalam menciptakan keunggulan kompetitif struktur perekonomian bangsa yang kokoh dengan dukungan SDM dan kemajuan IPTEK. SDM yang berkualitas merupakan aktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan sedangkan IPTEK menentukan keberhasilan dalam pembangunan nasional, ketangguhan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya budaya masyarakat.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari sangat membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Dukungan ketersediaan SDM dan kualitas yang memadai menjadi prasyarat mutlak dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan hutan lestari sampai tingkat tapak. Peranan lembaga diklat menjadi penting karena dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.

Pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur dan Non Aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Balai Diklat LHK Makassar melakukan perencanaan kerja untuk menghasilkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja tahun 2020 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kerja Balai Diklat LHK Makassar merupakan acuan bagi Balai Diklat LHK Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi. Dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Balai Diklat LHK Makassar perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan, maka kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur dan pihak-pihak lain (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Peningkatan profesionalisme aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui proses diklat lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat memenuhi kebutuhan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang memiliki kemampuan teknis, kepemimpinan, komitmen dan moralitas yang tinggi serta meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kerjasama di dalam melaksanakan pekerjaan atau penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, disamping guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Sebagai acuan awal, penyusunan dokumen renja merujuk pada Pagu Refocusing yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM nomor : S.11/P2SDM/SET/KEU.1/4/2020 pada tanggal 21 April 2020.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan P2SDM yang merupakan satuan organisasi yang mempunyai kewenangan mengelola kegiatan sesuai tugas dan fungsinya serta harus bertanggung jawab terhadap sasaran kinerja yang harus dicapainya.

### **2. Tugas Pokok**

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17,5 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non- aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan wilayah pelayanan sebanyak 10 provinsi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;

7. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

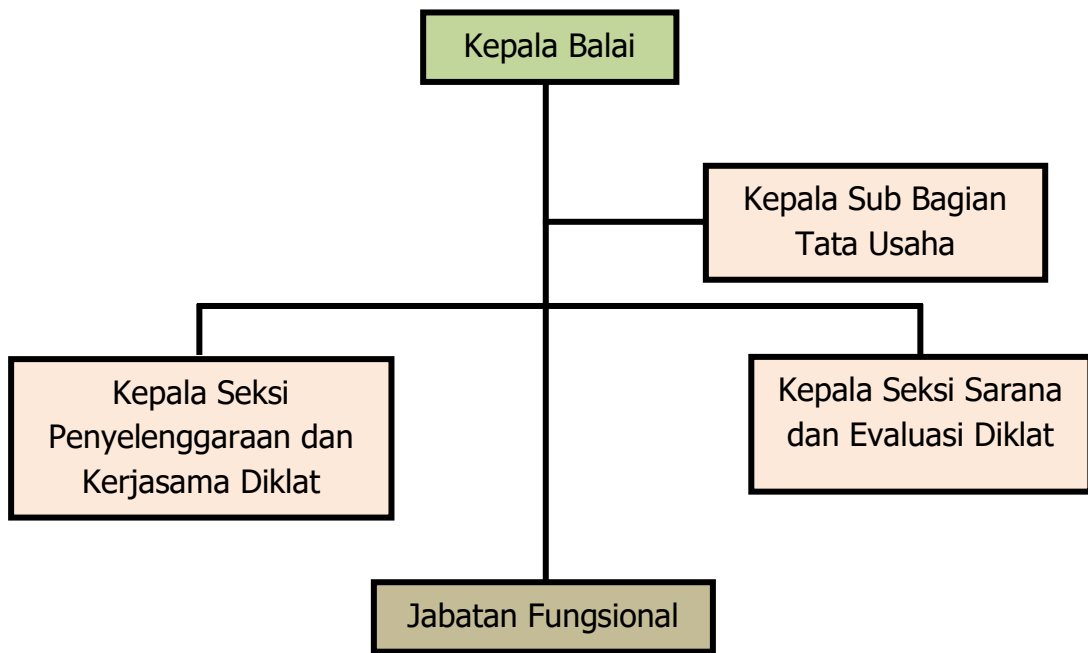
### **C. Struktur Organisasi dan SDM**

#### 1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Kehutanan Makassar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

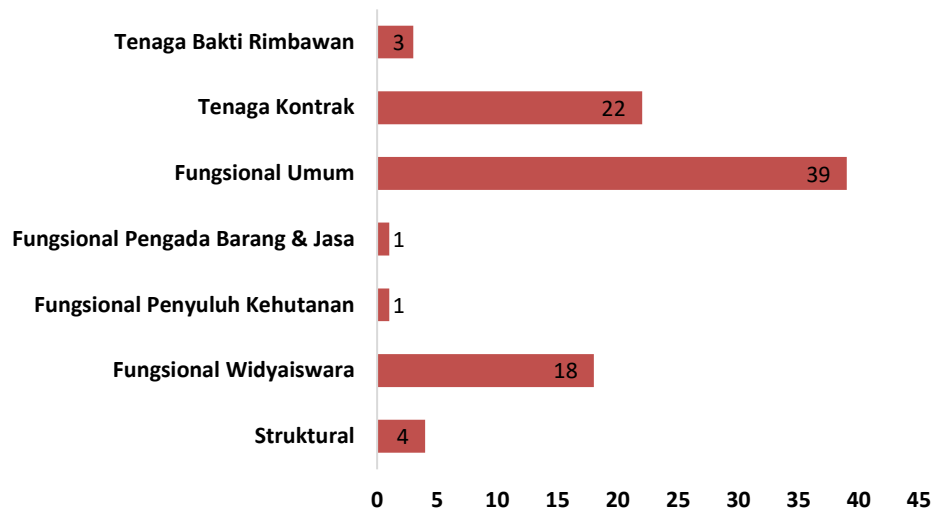
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi barang milik negara dan rumah tangga. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pasca diklat (EPD) dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.



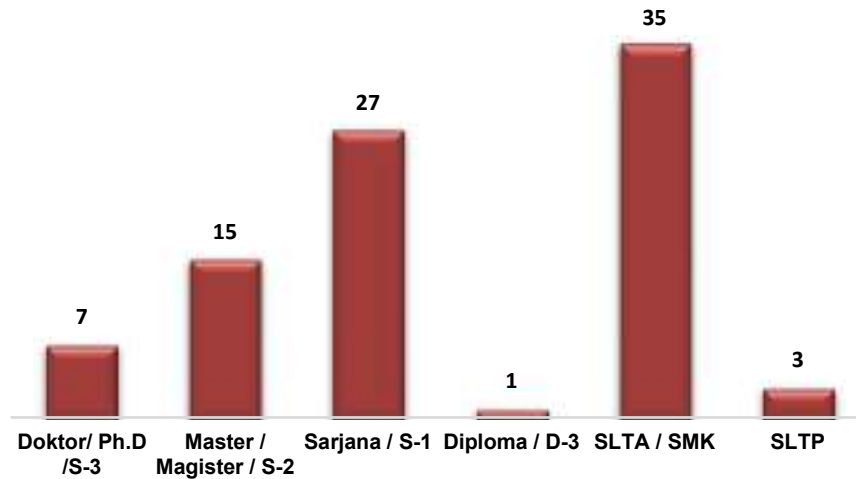
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Makassar

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan Desember tahun 2019 jumlah pegawai di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar sebanyak 88 (delapan puluh delapan) yang terdiri dari 65 laki-laki dan 23 perempuan, dengan rincian sesuai gambar berikut:



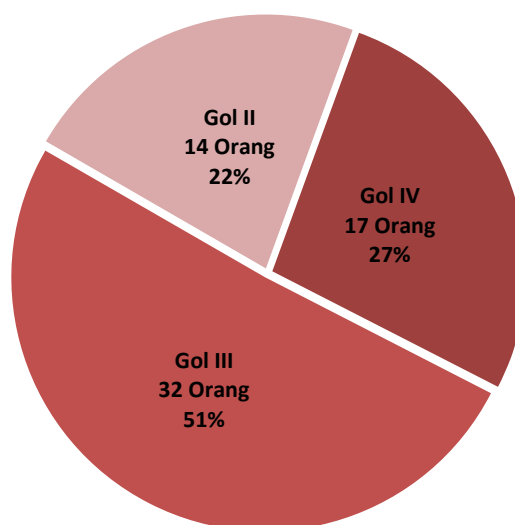
Gambar 2. Jumlah Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Jabatan



Gambar 3. Jumlah Pegawai Lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan																Jumlah (Orang)	
	IV					III				II				I				
	a	b	c	d	e	a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c		d
<b>BDLHK Makassar</b>	6	7	3	1	-	3	15	5	9	3	4	6	1	-	-	-	-	63



Gambar 4. Jumlah ASN Lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Golongan

## **BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020**

### **A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar TA 2019 tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar TA 2019

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan non aparatur	515 Orang	515 Orang	100
2	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran Kediklatan	1 Unit	1 Unit	100
3	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat	60 Orang	60 Orang	100
4	Layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan	1 Layanan	100
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
6	Meningkatnya kapasitas generasi muda lingkungan hidup	120 Orang	120 Orang	100

Perincian atas capaian indikator kinerja Balai Diklat LHK Makassar tahun 2019 sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur, terdapat beberapa komponen kegiatan diantaranya adalah :

- a. Diklat Administrasi
- b. Diklat Teknis
- c. Diklat Fungsional



d. Pendukung Kediklatan

Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat LHK Makassar TA 2019 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penyelenggaraan Diklat TA 2019

No	Jenis Diklat	Rencana			Realisasi			Ket
		Jml. Angk	Lama Diklat (Hari)	Jml. Peserta (Orang)	Jml. Angk	Lama Diklat (Hari)	Jml. Peserta (Orang)	
1	PUHH Kayu Hutan Hak	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
2	Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
3	Penjenjangan PEH Alih Jenjang Madya	1	15	30	1	15	30	BDLHK Makassar
4	SIG Berbasis Ponsel	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
5	Interpretasi Wisata Alam	1	9	30	1	9	30	BDLHK Makassar
6	Pengambilan Contoh Uji Air	1	5	31	1	5	31	BDLHK Makassar
7	SIG Bagi Operator	1	15	30	1	15	30	BDLHK Makassar
8	Rehabilitasi Mangrove	1	7	29	1	7	29	BDLHK Makassar
9	Pemetaan Konflik Tenurial	1	6	30	1	6	31	BDLHK Makassar
10	Tenaga Pendamping Masyarakat dalam Kebakaran Hutan	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
11	Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
12	Teknik Transplantasi Terumbu Karang	1	6	30	1	6	29	BDLHK Makassar
13	GANIS PHPL Kurpet	1	6	35	1	6	40	BDLHK Makassar
14	GANIS PHPL Pemandu Wisata	1	6	35	1	6	40	BDLHK Makassar
15	GANIS PHPL BINHUT	1	11	29	1	11	19	BDLHK Makassar
16	GANIS PHPL PKB	1	5	29	1	5	29	Manokwari
17	GANIS PHPL Pemandu Wisata	1	6	27	1	6	27	Manokwari
	<b>Jumlah</b>			<b>515</b>			<b>515</b>	

2) Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan

Sasaran terwujudnya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan hutan adalah sebagai implementasi dari misi meningkatkan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Tabo-Tabo sebagai sarana kediklatan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu diklat yang di selenggarakan oleh Balai Diklat LHK Makassar. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan berbagai jenis kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Tahun 2019

2. Pengembangan dan Pemanfaatan

*a. Peningkatan kualitas jalur tracking KHDTK*

*b. Pengembangan budidaya lebah madu*

3. Pemeliharaan

a. Pemeliharaan KHDTK

b. Sarana persuteraan alam

c. Saranan persemaian

4. Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan

5. Administrasi dan Pelaporan Kegiatan KHDTK

3) Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendamping KTH

Pelaksanaan Diklat Pendampingan KTH dilaksanakan sebanyak 2 angkatan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Rencana dan realisasi Diklat Pendampingan KTH dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana dan Realisasi Diklat Pendampingan KTH

No	Nama Diklat	Rencana			Realisasi			KET.
		Jml. Angk	Lama Diklat	Jml. Peserta	Jml. Angk	Lama Diklat	Jml. Peserta	
1	Pendampingan KTH Angk. I	1	5	30	1	5	30	BDLHK Makassar
2	Pendampingan KTH Angk. II	1	5	30	1	5	30	BDLHK Makassar
	<b>JUMLAH</b>			<b>60</b>			<b>60</b>	

#### 4) Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Pada kegiatan layanan perkantoran ini tidak sepenuhnya terserap maksimal dikarenakan adanya kelebihan alokasi anggaran tunjangan kinerja dan adanya sisa anggaran pada kegiatan langganan daya dan jasa.

Pengukuran capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja fisik Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019 untuk meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 100 %, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Selanjutnya pada tahun 2020, Balai Diklat LHK Makassar menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK serta Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar s/d Agustus 2020

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi s/d Agustus 2020</b>	<b>Prognosis s/d Desember 2020</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK	789 Orang	686 Orang	789 Orang
	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat	66,5 poin	66,5 poin	66,5 poin
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas generasi lingkungan hidup	150 Orang	150 Orang	150 Orang

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Pada tahun 2019, pagu anggaran Balai Diklat LHK Makassar mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 1.317.000.000,- (*satu milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah*) yang berasal dari Rupiah Murni (RM).

Sehingga pagu anggaran yang semula sebesar Rp. 14.992.118.000,- (*empat belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah*) berubah menjadi Rp. 16.309.118.000,- (*enam belas milyar tiga ratus Sembilan juta serratus delapan belas ribu rupiah*).

Adapun serapan anggaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2019, yakni realisasi keuangan sebesar Rp 16.270.837.274 (99,77%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Perincian serapan anggaran TA 2019 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran Balai Diklat LHK Makassar TA 2019

<b>Kode/Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Prosen (%)</b>
5441 Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	16,069,118,000	16,030,840,405	99,76
5443 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	240,000,000	239,996,869	100,00
	<b>16,309,118,000</b>	<b>16,270,837,274</b>	<b>99,77</b>

Selanjutnya untuk serapan anggaran tahun berjalan dan prognosis s/d Agustus 2020 tersaji pada tabel 7.

Tabel 7. Capaian serapan anggaran satker Balai Diklat LHK Makassar s/d Agustus 2020

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi s/d Agustus 2020 (Rp)</b>	<b>Prognosis s/d Desember 2020 (Rp)</b>
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	12.402.060.000	7.223.891.260	12.402.060.000
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	1.875.740.000	1.384.558.568	1.875.740.000
3	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	360.000.000	220.370.000	360.000.000
		<b>14.637.800.000</b>	<b>8.828.819.828</b>	<b>14.637.800.000</b>

## **BAB III**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2020**

### **A. Strategi dalam mendukung Program Kementerian LHK dan Program Prioritas Nasional**

#### a. Strategi dalam mendukung Program Kementerian LHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam dokumen Renstra 2020-2024 merumuskan tujuan pembangunan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah :

- 1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- 3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Balai Diklat LHK Makassar sebagai UPT BP2SDM Kementerian LHK yang melaksanakan diklat bagi aparatur maupun non aparatur SDM LHK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur maupun non aparatur SDM LHK melalui pelatihan bidang LHK dan mampu melaksanakan tugas secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan serta program-program kehutanan yang telah disusun oleh Kementerian LHK.

## b. Strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan Visi dan Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong". Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yang menjadi prioritas terdapat dalam 9 (sembilan) agenda yang disebut Nawa Cita :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan tema dan sasaran pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2019 pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional yang terdiri dari:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industry, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energy pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat LHK Makassar, maka strategi untuk mendukung prioritas tersebut di atas terutama dalam pembangunan manusia adalah dengan menyelenggarakan diklat aparatur dan non aparatur di bidang LHK, mewujudkan KHDTK Tabo-Tabo sebagai sarana pembelajaran diklat, menyelenggarakan pelatihan pendampingan KTH, dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat di bidang kehutanan yang kemudian dijabarkan lagi dengan indikator kinerja kegiatan.

## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan

Rencana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat LHK Makassar, adalah untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur sebanyak 789 orang

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat teknis dan fungsional sebanyak 390 orang bertujuan untuk meningkatkan daya saing SDM LHK untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.255.740.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Indikator pencapaian sasaran di atas meliputi:

#### 1. Terselenggaranya Diklat Teknis dan Fungsional

Untuk mencapai hasil kegiatan dengan indikator sasaran di atas, ditetapkan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang diikuti oleh 789 orang aparatur sumber daya manusia LHK, yang pelaksanaan diklat dilaksanakan di Makassar. Diklat ini terdiri dari 12 jenis dan 27 angkatan. Jenis diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan tersaji pada tabel 8.

Tabel 8. Jenis Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2020

JENIS DIKLAT	JML ORANG	LAMA DIKLAT	JUMLAH JPL	JUMLAH ANGK.
1. Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
2. Alih Tingkat Polhut Terampil Ke Polhut Ahli	30 orang	9 hari	70 JPL	1 Angk.
3. PUHH Kayu Hutan Negara	30 orang	8 hari	60 JPL	1 Angk.
4. Resolusi Konflik Sumber Daya Alam	30 orang	5 hari	45 JPL	1 Angk.
5. Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
6. Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
7. Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.

8. Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial	364 orang	4 hari	25 JPL	12 Angk.
9. SIG Berbasis Ponsel	90 orang	5 hari	35 JPL	3 Angk.
10. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkesadaran Hukum	22 orang	4 hari	26 JPL	1 Angk.
11. Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)	30 orang	5 hari	40 JPL	1 Angk.
12. Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP	90 orang	4 hari	30 JPL	3 Angk.
<b>JUMLAH</b>	<b>789 orang</b>			<b>27 Angk</b>

## 2. Pendukung Kediklatan

Pendukung kediklatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terlaksananya penyelenggaraan kediklatan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

### a. Kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran Diklat

Kegiatan perencanaan, program dan anggaran diklat dilaksanakan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat LHK Makassar. Kegiatan ini juga untuk mengembangkan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program serta keterpaduan rencana dan program diklat antara Balai Diklat LHK Makassar dengan unit kerja dan pihak terkait lain baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021
- 3) Penyusunan RKA-KL Tahun 2021
- 4) Penyusunan POK Tahun 2020
- 5) Peningkatan Kapasitas Pegawai
- 6) Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

b. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Diklat

Kerjasama diklat antar Balai Diklat LHK Makassar dan pengguna diklat (UPT Pusat, Dinas-Dinas, UPT Daerah, Asosiasi dan lain-lain) diperlukan untuk mengakomodir diklat-diklat yang dibutuhkan oleh para pengguna diklat. Kegiatan yang menunjang dalam rangka mengembangkan kerjasama diklat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu dengan melaksanakan koordinasi kerjasama diklat dan melaksanakan konsultasi ke pusat dan ke wilayah pelayanan.

*2. Terwujudnya KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan sebanyak 1 unit*

Sasaran terwujudnya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan hutan adalah sebagai implementasi dari misi meningkatkan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Tabo-Tabo sebagai sarana kediklatan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu diklat yang di selenggarakan oleh Balai Diklat LHK Makassar. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah).

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan berbagai jenis kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK
2. Pengembangan Sarana Diklat Bidang Eco-Edu-tourism pada KHDTK Diklat Kehutanan
3. Pemeliharaan KHDTK Diklat Kehutanan Bersama Masyarakat
4. Sarana Pemeliharaan Satwa
5. Sarana Persemaian
6. Perlindungan dan Pengamanan KHDTK Bersama Masyarakat
7. Penyuluhan
8. Administrasi dan Pelaporan Kegiatan KHDTK
9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
10. Pembayaran Honorarium Tenaga Bakti Rim-bawan
11. Pemanfaatan Sarana Rumah Produksi Gula Semut Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

12. Pemanfaatan Batas Lok, Petak dan Demplot
13. Inventarisasi dan Verifikasi Pemanfaatan HHBK dan Tanaman Obat Oleh Masyarakat di Sekitar KHDTK Diklat Kehutanan
14. Pengembangan Sarana Produksi Jamur Tiram Bersama Masyarakat

### *3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 1 Layanan*

Kegiatan layanan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin serta Renovasi Gedung/Bangunan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah).

### *4. Layanan Perkantoran sebanyak 1 Layanan*

Kegiatan layanan perkantoran merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran yang dapat melibatkan baik barang maupun jasa. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 11.980.000.000,- (*sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*). Jenis kegiatan meliputi:

#### 1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak 63 (enam puluh tiga) orang pegawai baik PNS dan CPNS atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan layanan perkantoran sehari-hari baik di Balai Diklat LHK Makassar. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) Pemeliharaan Gedung Negara di Makassar dan di KHDTK Tabo-Tabo
- 2) Pemeliharaan Kendaraan Operasional
- 3) Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- 4) Pembayaran Langganan dan Jasa
- 5) Pemeliharaan Peralatan/Barang Inventaris Kantor
- 6) Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Institusi
- 7) Operasional Kegiatan Informasi dan Komunikasi

##### *5. Meningkatnya Kapasitas Generasi Muda Lingkungan Hidup Melalui Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan sebanyak 150 Orang*

Dalam rangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kegiatan pendampingan Kelompok Tani Hutan sangat penting. Untuk mendukung kegiatan Perhutanan Sosial perlu ditingkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya melalui penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (Kelompok Tani Hutan). Sasaran kegiatan ini sebanyak 150 orang (5 angkatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan pelatihan masyarakat seperti yang tersaji pada table 9.

Tabel 9. Jenis Pelatihan Masyarakat Tahun 2020

<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>JML ORANG</b>	<b>LAMA DIKLAT</b>	<b>JUMLAH JPL</b>	<b>JUMLAH ANGK.</b>
1. Pembuatan Pupuk Bokashi	30 orang	3 hari	34 JPL	1 Angk.
2. SIG Berbasis Ponsel	30 orang	3 hari	35 JPL	1 Angk.
3. Budidaya Tanaman Porang Agroforestry	30 orang	3 hari	29 JPL	1 Angk.
4. Teknik Pengolahan Nira Aren	30 orang	3 hari	30 JPL	1 Angk.
5. Budidaya Lebah Trigona SP	30 orang	3 hari	30 JPL	1 Angk.
<b>JUMLAH</b>	<b>150 orang</b>			5 Angk.

Untuk mendukung kegiatan pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM di Balai Diklat LHK Makassar pada tahun 2020 diperlukan anggaran yang memadai. Pengalokasian anggaran tahun 2020 pada Balai Diklat LHK Makassar telah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (ABK), sehingga setiap kegiatan jelas terukur sasaran yang ingin dicapainya.

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan diklat di Balai Diklat LHK Makassar tahun 2020 adalah **Rp. 14.637.800.000,-** (*empat belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian anggaran dan target kinerja lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S.302/MK.02/2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2020. Oleh karena itu rencana Balai Diklat LHK Makassar berubah merujuk pada Pagu Refocusing yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM nomor : S.11/P2SDM/SET/KEU.1/4/2020 pada tanggal 21 April 2020.

Agar penyelenggaraan kegiatan diklat SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar diharapkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Selain itu, diharapkan pula adanya masukan-masukan dan saran-saran guna lebih mengembangkan program dan kegiatan penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan di masa datang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan penyelenggaraan diklat SDM lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 lebih terarah, efisien, efektif dan optimal dalam upaya mendukung pelaksanaan pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan.



Lampiran 1.

**MATRIK RENCANA DAN KEGIATAN TAHUN 2020**  
**SATKER BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

No.	Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/Indikator Elemen	Sasaran	Target	Satuan	Alokasi (Rupiah)	Lokasi
	<b><i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i></b>					
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	layanan	71,060,000	Makassar
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	layanan	351,000,000	Makassar
3	Layanan Perkantoran	1	1	layanan	11,980,000,000	Makassar
	<b><i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK</i></b>					
4	Jumlah SDM Aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya	789	789	orang	1,255,740,000	Makassar
5	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	66,50	66,50	poin	620,000,000	Kab. Pangkep
	<b><i>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</i></b>					
6	Jumlah generasi muda lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya	150	150	orang	360,000,000	Makassar
	<b>Jumlah</b>				<b>14,637,800,000</b>	

**RENCANA DIKLAT TAHUN 2020**  
**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

No	Nama Diklat	Lama Diklat	Jumlah JPL	Jumlah Peserta	Ket
5441.001 Jumlah Kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya					
1	Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	6 hari	50	30	
2	Alih Tingkat Polhut Terampil ke Polhut Ahli	9 hari	70	30	
3	Penatausahaan Hasil Hutan ( PUHH) Kayu Hutan Negara	8 hari	60	30	
4	Resolusi Konflik Sumber Daya Alam	5 hari	45	30	
5	Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	6 hari	50	30	
6	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	6 hari	50	30	
7	Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	6 hari	50	30	
8	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan	4 hari	25	35	
9	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan II	4 hari	25	35	
10	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan III	4 hari	25	30	
11	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan IV	4 hari	25	30	
12	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan V	4 hari	25	30	
13	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan VI	4 hari	25	32	
14	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan VII	4 hari	25	29	
15	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan VIII	4 hari	25	31	
16	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan IX	4 hari	25	30	
17	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan X	4 hari	25	35	
18	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan XI	4 hari	25	22	
19	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial Angkatan XII	4 hari	25	25	
20	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan I	5 hari	35	30	
21	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan II	5 hari	35	30	
22	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan III	5 hari	35	30	
23	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkesadaran Hukum	4 hari	26	22	
24	Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 hari	40	30	
25	Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP Angkatan I	4 hari	30	30	
26	Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP Angkatan II	4 hari	30	21	
27	Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP Angkatan III	4 hari	30	22	
<b>JUMLAH</b>				<b>789</b>	

5443.002 Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang meningkatnya kapasitasnya					
1	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	4 hari	34	30	
2	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	5 hari	35	30	
3	Pelatihan Budidaya Tanaman Porang Agroforestry	4 hari	29	30	
4	Pelatihan Teknik Pengolahan Nira Aren	4 hari	30	30	
5	Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP	4 hari	30	30	
<b>JUMLAH</b>				<b>150</b>	

## Lampiran 3.

**RENCANA KINERJA TAHUN 2020**  
**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN					KET.	
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Uraian	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	5	6		7	8	9	
1.	Layanan Dukungan Manajemen pada Balai Diklat LHK 1 layanan	Terlaksananya layanan dukungan manajemen pada Balai Diklat LHK dengan baik	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi diklat, pengelolaan kepegawaian dan pelayanan umum	- Pelaksanaan IKD - Renja 2021 - Penyusunan RKA-KL 2021 - Pengelolaan Kepegawaian - Pelaksanaan EPD - Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Masukan Keluaran Hasil	: : : - Dana - SDM Dokumen IKD, EPD, Renja, RKA-KL/DIPA, POK Terlaksananya pengembangan dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi rencana, program dan anggaran	Dokumen Unit Kerja	71.060.000 8 5 1	
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 layanan	Terlaksananya layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan baik	Tersedianya sarana dan prasarana internal yang baik	Pengadaan sarana dan prasarana internal yang baik	Masukan Keluaran Hasil	: : : - Dana - SDM Sarana dan prasarana internal yang efektif dan efisien Tersedianya sarana dan prasarana internal	Rp Orang Layanan Unit Kerja	351.000.000 3 1 1	
3.	Layanan Perkantoran 1 layanan	Terlaksananya layanan perkantoran dengan baik	Gaji dan Tunjangan 1 layanan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 1 layanan	Masukan Keluaran Hasil	: : : - Dana - SDM Gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan sesuai dengan peruntukannya Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal	Rp Orang Bulan Unit Kerja	8.032.632.000 12 1	
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor selama 12 bulan	Pembayaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor selama 12 bulan	Masukan Keluaran Hasil	: : : - Dana - SDM Operasional dan kegiatan pemeliharaan perkantoran terbayarkan Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran secara teratur dan optimal	Rp Orang Bulan Unit Kerja	3.947.368.000 12 1	
4.	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur sebanyak 789 orang.	Terselenggaranya Diklat Teknis dan Fungsional	Peserta Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 789 orang (27 angk.)	Diklat Teknis dan Fungsional untuk SDM Aparatur LHK	Masukan Keluaran Hasil	: : : - Dana - SDM Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai dengan jabatannya Tersedianya pegawai yang telah memiliki kompetensi/kemampuan yang memadai	Orang Orang	1.255.740.000 7 789 789	
5.	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat sebanyak 66.5 poin	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada KHDTK Tabo-Tabo untuk mendukung fungsinya	Perencanaan KHDTK	- Rencana Pengelolaan KHDTK 2021	Masukan	: : : - Dana - SDM Dokumen Rencana Pengelolaan KHDTK	Rp Orang Dokumen Unit Kerja	620.000.000 3 3 1	

SASARAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN					KET.	
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Uraian	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	5	6		7	8	9	
				<i>Keluaran Hasil</i>		Tersedianya informasi tentang rencana pengelolaan KHDTK Tabo-Tabo, baik jangka pendek, menengah dan panjang			
		Pemeliharaan KHDTK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan demplot-demplot, batas Kawasan dan jalan, tracking</li> <li>- Pengembangan sarana diklat bidang ecoedutourism</li> <li>- Sarana persemaian</li> <li>- Pemeliharaan satwa</li> <li>- Pemanfaatan sarana rumah produksi gula semut</li> <li>- Inventarisasi dan verifikasi pemanfaatan HHBK dan tanaman obat</li> <li>- Pengembangan sarana produksi jamur tiram</li> </ul>	<i>Masukan</i> : <i>Keluaran Hasil</i> :	- Dana - SDM Pemeliharaan pada KHDTK Tabo-Tabo Terpeliharanya KHDTK sesuai dengan fungsinya	Rp Orang Kegiatan Unit Kerja	1 1		
		Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan KHDTK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan Pengamanan</li> <li>- Penyuluhan</li> </ul>	<i>Masukan</i> : <i>Keluaran Hasil</i> :	- Dana - SDM Perlindungan dan pengamanan kawasan serta penyuluhan untuk KTH Terciptanya kondisi aman terhadap KHDTK dan KTH yang berfungsi secara baik	Rp Orang Kegiatan Unit Kerja	1 1		
		Administrasi dan Pelaporan KHDTK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi dan pelaporan</li> <li>- Pelayanan Data dan Informasi</li> <li>- Tenaga Bakti Rimbawan</li> <li>- Monev dan pelaporan</li> </ul>	<i>Masukan</i> : <i>Keluaran Hasil</i> :	- Dana - SDM Laporan kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat Tersedianya laporan kegiatan yang baik	Rp Orang Berkas Unit Kerja	1 1		
6.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan sebanyak 150 orang.	Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	Peserta Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan sebanyak 150 orang (5 angk.)	Diklat Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	<i>Masukan</i> : <i>Keluaran Hasil</i> :	- Dana - SDM Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan bidang kehutanan sesuai dengan kebutuhannya Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pelatihan kehutanan	Orang Orang	360.000.000 7 150 150	